



BUPATI MINAHASA

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-undang . / .

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Minahasa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Minahasa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.238.476.664.396,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp86.514.376.000,00 (delapan puluh enam miliar lima ratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.000.000.000,00 (empat puluh empat miliar rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.968.157.000,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.846.219.000,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Parkir
 - g. Pajak Air Tanah
 - h. Pajak Sarang Burung Walet
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.755.750.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.044.500.000,00 (tiga miliar empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

(4) Pajak /.

- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp938.075.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah);
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (h) huruf g direncanakan sebesar Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.775.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp5.300.000.000,00 (lima miliar tiga ratus juta rupiah);
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp18.466.075.000,00 (delapan belas miliar empat ratus enam puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum
 - b. Retribusi Jasa Usaha
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.110.506.000,00 (dua miliar seratus sepuluh juta lima ratus enam ribu rupiah);
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.557.651.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 8

Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:

- a. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
- b. Jasa Giro

- c. Pendapatan Bunga
- d. Pendapatan BLUD

Pasal 9

- (1) Anggaran Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (2) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.246.219.000,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (3) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah Jasa Giro pada Kas Daerah.
- (4) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.128.698.191.000,00 (satu triliun seratus dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.062.798.191.000,00 (satu triliun enam puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65.900.000.000,00 (enam puluh lima miliar sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Fiskal
 - c. Dana Desa
- (2) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp884.658.146.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat miliar enam ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (3) Anggaran Dana Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.478.235.000,00 (sepuluh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- (4) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp167.661.810.000,00 (seratus enam puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp35.572.266.000,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (2) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp644.506.297.000,00 (enam ratus empat puluh empat miliar lima ratus enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp41.862.866.000,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (4) Anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp162.716.717.000,00 (seratus enam puluh dua miliar tujuh ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah).

Pasal 13

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan Rp65.900.000.000,00 (enam puluh lima miliar sembilan ratus juta rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Pasal 14

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan Rp23.264.097.396,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus enam puluh empat juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- Pendapatan Hibah;
 - Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri.
- (3) Anggaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.264.097.396,00 (sembilan belas miliar dua ratus enam puluh empat juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 15

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.251.321.514.800,00 (satu triliun dua ratus lima puluh satu miliar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 16

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp896.431.428.529,00 (delapan ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga;
- d. Belanja hibah; dan
- e. Belanja bantuan sosial.

Pasal 17

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp537.501.082.749,00 (lima ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus satu juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Gaji dan tunjangan ASN;
- b. Tambahan Penghasilan ASN;
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
- g. Belanja Pegawai BOS;
- h. Belanja Pegawai BLUD.

Pasal 18

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp297.467.394.453,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang;
- b. Belanja Jasa;
- c. Belanja Pemeliharaan;
- d. Belanja Perjalanan Dinas
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS
- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Pasal 19

Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp51.381.969.062,00 (lima puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang Pakai Habis;
- b. Belanja Barang Tak Habis Pakai

Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp147.296.531.403,00 (seratus empat puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Jasa Kantor;
- b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi
- c. Belanja Sewa Tanah
- d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin
- e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan
- f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi
- g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi
- h. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
- i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan
- j. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah

Pasal 21

Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c direncanakan sebesar Rp6.526.215.309,00 (enam miliar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
- b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Pasal 22

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d direncanakan sebesar Rp46.027.532.529,00 (empat puluh enam miliar dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Pasal 23

Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e direncanakan sebesar Rp381.750.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Pasal 24

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f direncanakan sebesar Rp15.853.396.150,00 (lima belas miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).

Pasal 25

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal . /.

Pasal 26

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c direncanakan sebesar Rp10.159.563.327,00 (sepuluh miliar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB).

Pasal 27

Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d direncanakan sebesar Rp49.076.138.000,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
- b. Belanja Hibah Dana BOS; dan
- c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 28

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e direncanakan sebesar Rp2.227.250.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp93.314.589.771,00 (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya
- (2) Anggaran belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp222.918.080,00 (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan puluh rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Tanah Persil.
- (3) Anggaran belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp20.331.125.923,00 (dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur
 - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
 - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
 - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan
 - g. Belanja Modal Alat Laboratorium
 - h. Belanja Modal Komputer
 - i. Belanja Modal Alat Eksplorasi
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja

- (4) Anggaran belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.015.466.996,00 (lima puluh tiga miliar lima belas juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung
 - b. Belanja Modal Monumen
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD
- (1) Anggaran belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 18.517.390.472,00 (delapan belas miliar lima ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan
 - b. Belanja Modal Bangunan Air
 - c. Belanja Modal Jaringan
- (2) Anggaran belanja Modal Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.227.688.300,00 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
 - b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS
 - d. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD

Pasal 30

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c direncanakan sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d direncanakan sebesar Rp248.575.496.500,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil
 - b. Belanja Bantuan Keuangan

Pasal 32

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp73.844.850.404,00 (tujuh puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus empat rupiah), yaitu Penerimaan pembiayaan yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Penerimaan pinjaman daerah;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp39.173.850.404,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus empat rupiah).

- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 34.671.000.000,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh satu juta rupiah).

Pasal 33

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp61.000.000.000,00 (enam puluh satu miliar rupiah), yaitu Pengeluaran pembiayaan yang terdiri atas Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

Pasal 34

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp(12.844.850.404,00) (dua belas miliar delapan ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus empat rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp12.844.850.404,00 (dua belas miliar delapan ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus empat rupiah).

Pasal 35

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;
11. Lampiran XI Daftar Alokasi Anggaran Dana Bos Sekolah;
12. Lampiran XII Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi Per FKTP.

Pasal 36

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 35 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 38

Peraturan Bupati Minahasa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

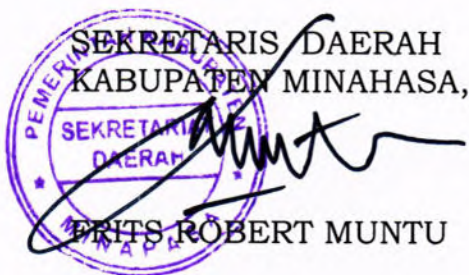
Ditetapkan di **TONDANO**
pada tanggal **29 DESEMBER 2022**

BUPATI MINAHASA,



ROYKE OCTAVIAN RORING

Diundangkan di **TONDANO**
pada tanggal **29 DESEMBER 2022**



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA,**

FRITS ROBERT MUNTU

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MINAHASA
 NOMOR 65 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN MINAHASA RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	86.514.376.000
4.1.01	Pajak Daerah	44.000.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	3.755.750.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	3.700.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	3.700.000.000
4.1.01.06.02	Pajak Motel	15.500.000
4.1.01.06.02.0001	Pajak Motel	15.500.000
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	8.250.000
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	8.250.000
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	32.000.000
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	32.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	3.044.500.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.025.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.025.000.000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	547.000.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	547.000.000
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	146.000.000
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	146.000.000
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.326.500.000
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.326.500.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	112.500.000
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	112.500.000
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	112.500.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	938.075.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	822.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	822.000.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	88.750.000
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	88.750.000
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	15.325.000
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	15.325.000
4.1.01.09.04	Pajak Reklame Selebaran	8.500.000
4.1.01.09.04.0001	Pajak Reklame Selebaran	8.500.000
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	3.500.000
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	3.500.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	10.500.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	10.500.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	10.500.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	30.000.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	30.000.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	30.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	62.500.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	62.500.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	62.500.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	15.600.000
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	15.600.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	15.600.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.775.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.775.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.775.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.300.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	5.300.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	5.300.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	18.466.075.000

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	18.466.075.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	18.466.075.000
4.1.02	Retribusi Daerah	4.968.157.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.110.506.000
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	854.506.000
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	854.506.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.001.000.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.001.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	65.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	65.000.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	150.000.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	150.000.000
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	40.000.000
4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	40.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.300.000.000
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.300.000.000
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1.300.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.557.651.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.495.651.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	1.495.651.000
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	10.000.000
4.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	10.000.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	52.000.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	52.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.700.000.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	3.700.000.000
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.700.000.000
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.700.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	33.846.219.000
4.1.04.05	Jasa Giro	3.246.219.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.189.219.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.189.219.000
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	20.000.000
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	20.000.000
4.1.04.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	17.000.000
4.1.04.05.04.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	17.000.000
4.1.04.05.05	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	20.000.000
4.1.04.05.05.0001	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	20.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	600.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	600.000.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	600.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	30.000.000.000
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	30.000.000.000
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	30.000.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.128.698.191.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.062.798.191.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	884.658.146.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	35.572.266.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	6.622.634.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	6.412.174.000
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	16.306.151.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	4.577.749.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	28.922.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.624.636.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	644.506.297.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	644.506.297.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	41.862.866.000



Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.151.202.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	4.416.322.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	7.007.455.000
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	612.600.000
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	12.786.964.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	927.185.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	12.825.910.000
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	2.135.228.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	162.716.717.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	37.599.630.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.975.000.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	83.467.700.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	922.500.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.538.830.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.982.740.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	25.688.173.000
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	398.724.000
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	0
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	6.256.645.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	448.700.000
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	438.075.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	10.478.235.000
4.2.01.02.01	DID	10.478.235.000
4.2.01.02.01.0001	DID	10.478.235.000
4.2.01.05	Dana Desa	167.661.810.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	167.661.810.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	167.661.810.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	55.900.000.000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	65.900.000.000
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	65.900.000.000
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	10.900.000.000
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.500.000.000
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	27.200.000.000
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.500.000.000
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	15.800.000.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	23.264.097.396
4.3.01	Pendapatan Hibah	4.000.000.000
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	4.000.000.000
4.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	4.000.000.000
4.3.01.04.01.0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	4.000.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	19.264.097.396
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	19.264.097.396
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	19.264.097.396
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	19.264.097.396
	Jumlah Pendapatan	1.238.476.664.396
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	896.431.428.529
5.1.01	Belanja Pegawai	537.501.082.749
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	346.797.274.481
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	249.025.604.241
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	220.675.505.366
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	28.350.098.875
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	24.693.845.159

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	20.412.777.765
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.281.067.394
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	11.008.188.992
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	11.008.188.992
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	20.175.821.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	15.015.176.000
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5.160.645.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.825.944.998
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.825.944.998
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	13.418.702.486
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	10.752.851.886
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.665.850.600
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.402.923.540
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.151.758.360
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	251.165.180
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	8.804.164
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	7.872.030
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	932.134
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	21.304.502.145
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	19.799.756.633
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.504.745.512
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	651.888.672
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	574.098.958
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	77.789.714
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.959.526.118
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.726.156.991
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	233.369.127
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.321.522.966
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.297.183.983
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	24.338.983
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	81.592.950.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	80.848.650.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	80.824.650.000
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	24.000.000
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	744.300.000
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	744.300.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	84.723.958.866
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	265.000.000
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	265.000.000
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	83.467.700.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	83.467.700.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	922.500.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	922.500.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	68.758.866
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	64.200.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.558.866
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	16.989.106.662
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	109.485.600
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	109.485.600
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	141.943.200
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	141.943.200
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	78.204.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	78.204.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	120.216.600
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	120.216.600

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	24.725.400
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	24.725.400
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.646.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.646.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	661.500.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	661.500.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	376.194
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	376.194
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	22.596
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	22.596
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.338.635.072
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	88.200.000
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.608.768
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	4.826.304
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	5.244.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.952.000.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.952.000.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.183.112.240
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	71.965.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	71.965.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.354.000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.354.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.355.000
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.355.000
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.411.000
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.411.000
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	4.000
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	4.000
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.242.240
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.242.240
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	149.000
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	149.000
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	447.000
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	447.000
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	884.572.000
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	75.505.000
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	61.206.000
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	2.261.000
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	18.859.000
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	211.092.000
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	603.000
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1.256.000
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	313.000
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	35.684.000
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	106.551.000
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	371.242.000
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	99.876.000
5.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	17.178.000
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	20.124.000
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.306.000
5.1.01.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	3.015.000
5.1.01.05.11.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	804.000
5.1.01.05.11.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	26.135.000
5.1.01.05.11.0025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	30.068.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.11.0026	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	201.000
5.1.01.05.11.0027	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.045.000
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	5.703.800.500
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	5.703.800.500
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	5.703.800.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.467.394.453
5.1.02.01	Belanja Barang	51.381.969.062
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	51.381.969.062
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	518.612.121
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.071.783.986
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	2.974.800
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.871.758.500
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	67.743.300
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	24.384.450
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	43.200.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	735.267.003
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	977.929.646
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.830.878.327
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	338.662.075
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.301.701.020
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	87.484.500
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	304.860.837
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	63.162.500
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	23.939.400
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	492.020.310
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.957.598.315
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.794.564.349
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	6.813.926.390
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	307.956.482
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.596.906.543
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12.222.023.550
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	11.455.188
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	121.050.000
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	150.000.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	168.971.970
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	362.000.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	161.500.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	489.896.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	27.000.000
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	214.500.000
5.1.02.01.01.0072	Belanja Pakaian Kerja Bengkel	2.497.500
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	122.000.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	153.000.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	424.080.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	348.680.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	176.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	147.296.531.403
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	115.214.873.189
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.971.867.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.158.250.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	150.000.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.241.000.000




Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	40.360.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	59.000.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	314.400.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	31.565.235.360
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	7.200.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.520.000.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	80.000.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	120.000.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	777.600.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	11.828.400.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4.265.700.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10.254.590.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	17.679.660.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	10.185.600.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	3.656.240.000
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	357.136.095
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	404.512.500
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	70.959.292
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	129.250.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	2.163.000.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	10.800.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	121.338.780
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	10.530.122.222
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	89.320.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.963.398.200
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	13.750.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	283.083.740
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	203.100.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	26.938.113.804
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	23.421.213.804
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.246.400.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.270.500.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.599.432.100
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	14.400.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	222.682.500
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	324.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	658.369.600
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	19.980.000
5.1.02.02.04.0206	Belanja Sewa Alat Kedokteran Keluarga Berencana	360.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	627.796.250
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	349.046.250
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	278.750.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.110.466.560
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	170.000.000
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	4.500.000
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	99.997.680
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	342.218.880
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	130.000.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	5.500.000
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	58.250.000
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	300.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	432.382.500
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	432.382.500
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.373.467.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	548.467.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	825.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	6.526.215.309

KEMENTERIAN KEKORPORASIAN DAN INDIKATOR
 PERENCANAAN DAN MANAJEMEN
 2/1

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.837.277.896
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.000.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.325.776.400
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	103.880.000
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	2.079.456.000
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	160.074.996
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	23.790.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15.850.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	13.320.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	112.130.500
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	158.228.034
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	158.228.034
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	530.709.379
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	400.000.000
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	130.709.379
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	46.027.532.529
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	45.315.925.577
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.216.445.609
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.471.401.768
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.415.070.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	213.008.200
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	711.606.952
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa, ÆLuar Negeri	711.606.952
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	381.750.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	381.750.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	381.750.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	15.853.396.150
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	15.853.396.150
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	15.853.396.150
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	30.000.000.000
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	30.000.000.000
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	30.000.000.000
5.1.03	Belanja Bunga	10.159.563.327
5.1.03.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	5.037.791.463
5.1.03.03.05	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	5.037.791.463
5.1.03.03.05.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	5.037.791.463
5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	5.121.771.864
5.1.03.04.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	5.121.771.864
5.1.03.04.03.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	5.121.771.864
5.1.05	Belanja Hibah	49.076.138.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	32.003.770.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.062.200.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.062.200.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	14.441.570.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	14.441.570.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	10.500.000.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	10.500.000.000
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	15.671.780.000
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	15.671.780.000
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	15.671.780.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.400.588.000
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.400.588.000
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.400.588.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.227.250.000





Kode	Uraian	Jumlah
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.167.250.000
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	2.167.250.000
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	2.167.250.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	60.000.000
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	60.000.000
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	60.000.000
5.2	BELANJA MODAL	93.314.589.771
5.2.01	Belanja Modal Tanah	222.918.080
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	222.918.080
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	222.918.080
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	222.918.080
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.331.125.923
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	21.932.060
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	21.932.060
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	21.932.060
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	470.315.702
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	92.089.475
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	75.631.475
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	16.458.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	233.887.002
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	24.244.236
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	17.408.777
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	15.300.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	152.780.500
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	24.153.489
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	144.339.225
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	24.150.000
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	10.000.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	19.540.225
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	37.260.000
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat	53.389.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	17.000.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	17.000.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	17.000.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	14.797.289.171
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	1.889.366.875
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.188.081.875
5.2.02.07.01.0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	694.685.000
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	6.600.000
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	12.907.922.296
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	12.907.922.296
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	8.881.325
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	8.881.325
5.2.02.08.01.0016	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	8.881.325
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.852.152.615
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.453.556.038
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	2.453.556.038
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	398.596.577
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	106.809.102
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	291.787.475
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	1.033.090.000
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	1.033.090.000
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	1.033.090.000
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	12.500.000
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	12.500.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	12.500.000
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.117.965.050
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.117.965.050
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.117.965.050
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.015.466.996
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	53.015.466.996
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	53.015.466.996
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.081.287.988
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	34.671.000.000
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	13.263.179.008
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18.517.390.472
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	13.551.407.820
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	12.831.407.820
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	12.831.407.820
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	720.000.000
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	720.000.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	4.874.982.656
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	400.940.014
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	400.940.014
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	118.042.642
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	118.042.642
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	4.356.000.000
5.2.04.02.06.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	4.356.000.000
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	90.999.996
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	90.999.996
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	90.999.996
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.227.688.300
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.227.688.300
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.227.688.300
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.227.688.300
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	13.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	13.000.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	13.000.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	13.000.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	13.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	248.575.496.500
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.550.208.200
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	4.053.392.500
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.053.392.500
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.053.392.500
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	496.815.700
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	496.815.700
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	496.815.700
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	244.025.288.300
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	244.025.288.300
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	244.025.288.300
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	8.355.622.000
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	167.661.810.000
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	68.007.856.300
	Jumlah Belanja	1.251.321.514.800
	Total Surplus/(Defisit)	(12.844.850.404)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	73.844.850.404
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	39.173.850.404
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	18.315.521.200

Kode	Uraian	Jumlah
6.1.01.02.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah	18.315.521.200
6.1.01.02.02.0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil	18.315.521.200
6.1.01.05	Penghematan Belanja	20.858.329.204
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	20.858.329.204
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	19.838.329.204
6.1.01.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	1.020.000.000
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	34.671.000.000
6.1.04.03	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	34.671.000.000
6.1.04.03.05	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	34.671.000.000
6.1.04.03.05.0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	34.671.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	73.844.850.404
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	61.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.000.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	60.000.000.000
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	48.000.000.000
6.2.03.03.05	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	48.000.000.000
6.2.03.03.05.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	48.000.000.000
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	12.000.000.000
6.2.03.04.09	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang	12.000.000.000
6.2.03.04.09.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang	12.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	61.000.000.000
	Pembiayaan Netto	12.844.850.404
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0



BUPATI MINAHASA,

ROYKE OCTAVIAN RORING